



# SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH (KUMPULAN KARANGAN ILMIAH)

Seri XXVII, No. 1, APRIL 2003

ISSN 0215 - 8809

- ▣ Deklarasi Perhimpunan Indonesia dan Konvensi Hatta-Semaun
- ▣ Jalan Panjang Menuju Keadilan Gender. Tanpa Patriarki dan Kyriarki
- ▣ Hsin : Sebuah Dinasti Penyela
- ▣ Pembelajaran Materi Demokrasi : Paradigma dan Aktivitas Di Luar Kelas.
- ▣ Model Sosial Inkuiri dalam Interaksi Belajar-Mengajar Sejarah
- ▣ Relevansi Pemikiran Karl. Popper dengan Ilmu Sejarah

Terbitan

Program Studi Pendidikan Sejarah - FKIP  
dan Jurusan Ilmu Sejarah - Fakultas Sastra  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta



Majalah Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah (SPPS) adalah majalah ilmiah yang berisi kumpulan karangan ilmiah mengenai kesejarahan dan/atau ilmu-ilmu humaniora dari dosen-dosen Program Studi Pendidikan Sejarah – FKIP, dosen Jurusan Ilmu Sejarah – Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma serta hasil karangan ilmiah dari khalayak umum.

Karangan yang dimuat di SPPS diakui sebagai publikasi ilmiah oleh pemerintah dengan bobot maksimal 5, sebab SPPS ini sudah terdaftar di LIPI.

### SUSUNAN REDAKSI

1. Pelindung : 1. Dekan FKIP Universitas Sanata Dharma  
2. Dekan Fak. Sastra Universitas Sanata Dharma
2. Pemimpin Redaksi/  
Penanggung Jawab : Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H.
3. Wakil Pemimpin  
Redaksi/Penanggung  
Jawab : Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.
4. Sekretaris Redaksi : Drs. B. Musidi, M.Pd.
5. Anggota Redaksi : 1. Drs. G. Moedjanto, M.A.  
2. Drs. J.B.M. Mudjihardjo  
3. Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.  
4. Drs. A.A. Padi  
5. Dra. Theresia Sumini, M.Pd.  
6. Drs. Ign. Sandiwan Suharso  
7. Dra. Lucia Juningsih, M.Hum.  
8. Drs. H. Purwanta, M.A.  
9. Drs. Anton Haryono, M.Hum.  
10. Drs. Y.R. Subakti, M.Pd.  
11. Drs. Hb. Hery Santosa, M.Hum.  
12. Drs. Silverio R.L. Aji S.
6. Administrasi : Dra. Theresia Sumini, M.Pd.

### ALAMAT REDAKSI

PROGRAM Studi Pendidikan Sejarah – FKIP, Universitas Sanata Dharma,  
Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002  
Telp. (0274) 513301, 515352, Fax. (0274) 562383  
Telegram : SADHAR YOGYA  
E-mail : spps2000\_usd@hotmail.com

**SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH**  
**(Kumpulan Karangan Ilmiah)**

Seri XXVII, No. 1, April 2003

ISSN: 0215-8809

**DAFTAR ISI**

Daftar Isi .....	iii
Editorial .....	iv
DEKLARASI PERHIMPUNAN INDONESIA DAN KONVENSI HATTA-SEMAUN .....	1
<i>G. Moedjanto</i>	
JALAN PANJANG MENUJU KEADILAN GENDER. Tanpa Patriarki Dan Kyriarki. ....	16
<i>Silverio R. L. Aji Sampurno</i>	
HSIN : SEBUAH DINASTI PENYELA .....	32
<i>H. Purwanto</i>	
AMBITION OF A CREOLE.....	46
<i>Baskara T. Wardaya</i>	
PEMBELAJARAN MATERI DEMOKRASI: PARADIGMATISASI DAN AKTIVITAS DI LUAR KELAS....	51
<i>Anton Haryono</i>	
MODEL SOSIAL INQUIRY DALAM INTERAKSI BELAJAR- MENGAJAR SEJARAH .....	65
<i>UR Subakti</i>	
RELEVANSI PEMIKIRAN KARL R. POPPER DENGAN ILMU SEJARAH. Sumbangan Metode Problem Solving Terhadap Metodologi Ilmu Sejarah .....	85
<i>Drs. Siswanto, M. Si.</i>	



# PEMBELAJARAN MATERI DEMOKRASI: PARADIGMATISASI DAN AKTIVITAS DI LUAR KELAS

*Anton Haryono*

## A. Pengantar

Mempelajari sejarah suatu *nation state* tidak pernah akan lengkap apabila tidak disertai dengan perbincangan mendalam mengenai praktik kehidupan berdemokrasi. Dalam peradaban modern, pemerintahan negara bukan hanya urusan dan kewenangan satu orang atau sekelompok kecil anggota masyarakat, tetapi merupakan urusan dan kewenangan bangsa sebagai keseluruhan. Bertolak dari paradigma kesederajatan, secara sederhana demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan oleh banyak orang, atau pemerintahan berdasar pada kedaulatan rakyat; suatu sistem yang dapat dibedakan dengan monarki absolut, oligarkhi, ataupun tata pemerintahan kolonial.<sup>1</sup>

Kajian tentang demokrasi sudah barang tentu juga amat penting untuk pembelajaran sejarah Indonesia. Terbentuknya negara nasional Indonesia, sebagai antitesis kolonialisme, akan lebih bermakna apabila dipahami tidak sebatas pada berprosesnya nasionalisme, tetapi juga dasar-dasar filosofis yang menjiwai dan cita-cita yang menyertainya. Nasionalisme Indonesia tidak hanya mendobrak kolonialisme dan melahirkan kemerdekaan bangsa, tetapi juga mengidealkan tatanan kenegaraan baru yang bersendikan pada cita-cita perwujudan demokrasi. Artinya, secara ideal perubahan dari negara kolonial ke negara nasional bukan hanya soal pergantian kekuasaan, melainkan merupakan reformasi sistem. Negara kolonial didasarkan pada penjajahan, diskriminasi, dan eksploitasi bangsa asing; sedangkan negara nasional berbasis pada kemerdekaan, kesederajatan, dan persatuan bangsa sendiri.

Menurut Franz Magnis Suseno, pesan para *founding fathers* cukup jelas, yakni perwujudan demokrasi Indonesia. Lebih lanjut ia mengemukakan, bahwa keharusan Indonesia menjadi negara demokratis merupakan konsensus seluruh spektrum politik di Indonesia. Konsensus itu mempunyai dasar baik dalam Pancasila



Berkedaulatan rakyat.<sup>2</sup> Artinya, dalam perspektif historis, salah satu agenda penting bangsa Indonesia selama ini adalah demokratisasi.

Tata kehidupan demokratis yang mensyaratkan adanya demokratisasi memberi petunjuk yang jelas bahwa demokrasi tidak jatuh dari langit. Ia hanya akan ada bila diusahakan secara terus menerus. Dalam praksis, demokrasi tidak muncul sekali jadi, tetapi senantiasa berkembang dan memiliki pasang surutnya sendiri sesuai dengan komitmen bangsa dalam penegakannya secara bersama-sama. Bagaimanapun, penegakan kedaulatan rakyat bukanlah pekerjaan yang mudah, tidak semudah seperti merumuskan cita-citanya ataupun seperti ketika memberi dasar-dasar filosofis mengenainya.

Dalam tataran praksis, sejarah demokrasi memiliki spektrum yang luas. Termasuk di dalamnya keterbatasan-keterbatasan, penyimpangan-penyimpangan, dan paradoks-paradoks. Sejumlah prakarsa dapat dimaknai sebagai implementasi demokrasi, tetapi pada saat yang sama banyak perilaku yang justru bertentangan dengan esensi demokrasi itu sendiri. Artinya, demokrasi juga mengenal adanya kesenjangan yang tajam antara harapan dan kenyataan, atau antara gambaran ideal dengan realitas kongkretnya. Siapapun sepakat bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk aktualisasi demokrasi, tetapi pada zaman orde baru riil di dalamnya sering termuati oleh penyimpangan-penyimpangan manipulatif.

Pemilihan presiden oleh MPR ataupun pemilihan gubernur dan bupati oleh DPRD tentu juga didasarkan pada sendi-sendi demokrasi. Namun, pada saat yang sama kita tidak dapat menutup telinga perihal merebaknya isu politik uang selama proses pemilihan berlangsung ataupun protes-protes ketidakpuasan pasca pemilihan. Pada zaman orde baru kita menyaksikan status sekedar duduk dan tepuk tangan aklamatif meriah para anggota DPR/MPR dengan dasar pembenaran sebagai "cermin musyawarah mufakat". Demikian pula sebaliknya, pada era reformasi tergelar kecenderungan untuk saling baku hantam antar "wakil rakyat" dalam mempertahankan pendapat dan kepentingan masing-masing dengan legitimasi yang tidak kalah ampuh, yakni: "kebebasan



berpendapat". Apakah kedua perilaku itu benar-benar demi tegaknya kedaulatan rakyat?

Keberadaan lembaga-lembaga demokrasi tidak serta merta memberikan gambaran tentang kehidupan demokratis secara penuh. Setidaknya pada zaman orde baru kita menyaksikan bagaimana para mahasiswa pejuang moral politik diawasi, diintimidasi, digebuki, diculik, disiksa, dan bahkan ada yang harus mati kena peluru aparat yang ditembakkan secara sadar. Pers dikontrol dalam skala yang masif dengan senjata ampuhnya yakni SIUPP. Partai politik praktis dikebiri eksistensi dan perkembangannya. Bagaimanapun, pemerintahan yang anti kritik mengingkari esensi demokrasi dan tidak segan-segan untuk menginjak-injak martabat manusia. Dalam keadaan seperti itu lembaga-lembaga demokrasi akhirnya tidak lebih dari sekedar alat politik dan legitimasi bagi kekuasaan.

Sistem multi partai tentu juga merupakan perwujudan demokrasi; tetapi, ketika jumlah partai peserta pemilu mencapai 48 buah, tidak perlukah suatu pemahaman baru (secara dekonstruksional) atas perkembangan seperti itu? Ada apa di balik begitu mudahnya partai-partai politik bermunculan, yang konon pada tahun 2002 ini telah terdaftar suatu jumlah yang lebih besar lagi? Sampai di sini, pemahaman atas praksis demokrasi, selain spektrumnya cukup luas, juga tampak kerumitannya. Hal ini belum lagi jika dipikirkan bahwa yang harus dipelajari dari demokrasi tidak hanya yang berskala nasional, tetapi juga realitas-realitas lokal.

Pembelajaran tentang demokrasi dalam perspektif historis dirasa amat penting karena siswa sekolah pada dasarnya adalah generasi muda bagian integral dari rakyat pemilik kedaulatan itu sendiri. Perspektif historis akan memberikan gambaran kongkret berbagai pengalaman yang tidak hanya berguna bagi sebuah pengetahuan, tetapi juga bagi kepentingan praktis mereka dalam hidup bernegara. Aspek-aspek apa yang pantas dipertahankan, hal-hal apa yang mendesak untuk diperjuangkan keberadaannya, ataupun segi-segi apa yang mesti segera dihindari hanya akan dapat diketahui melalui sejarah. Filsuf Santayana pernah mengatakan: "*A nation that does not know history is fated to repeat it.*"<sup>3</sup> Mengingat



salah satu kebutuhan penting bangsa Indonesia saat ini adalah penegakan demokrasi, maka pembelajaran sejarah mengenainya perlu mendapat penekanan khusus.

Persoalannya kemudian adalah ketika alokasi waktu bagi pembelajaran sejarah di sekolah sangat sedikit bagaimana materi demokrasi dapat dipelajari siswa dengan agak mendalam? Konon alokasi waktu yang sangat sedikit itu dalam kurikulum terbaru masih diperkecil lagi karena pelajaran sejarah akan diintegrasikan dengan kewarganegaraan.<sup>1</sup> Tentu perlu diingat bahwa demokrasi hanyalah salah satu dari sekian banyak materi yang harus dipelajari siswa. Dari kenyataan ini mendesak untuk dipikirkan strategi pembelajarannya.

## **B. Demokrasi sebagai Paradigma**

Ketika alokasi waktu sangat terbatas, sementara substansi demokrasi harus dipahami secara optimum; maka, selain sebagai materi, kiranya akan sangat membantu apabila demokrasi juga dipakai sebagai paradigma pembelajaran atas sejumlah materi tertentu. Materi-materi tertentu itu tidak hanya dibahas dalam dirinya sendiri, tetapi diletakkan dalam format pemahaman demokrasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman atas materi demokrasi itu sendiri tanpa harus terlalu terkendala oleh keterbatasan waktu.

Pembelajaran tentang monarkhi, misalnya, tentu dapat dikaitkan dengan kepentingan pemahaman demokrasi. Dalam paradigma demokrasi, absolutisme raja berpeluang untuk dipertegas pembahasannya sebagai ketiadaan kedaulatan rakyat. Perilaku-perilaku politik kekuasaannya kemudian dapat dibingkai dalam keterkaitannya dengan ketiadaan seperti itu. Dengan kata lain, dalam konteks ini eksistensi rakyat dijadikan pijakan dalam memahami suatu kekuasaan. Untuk itu, ketika monarkhi konstitusional (bukan absolut) harus dibahas misalnya, dasar pijakannyapun seharusnya sama, yakni eksistensi rakyat. Hal serupa juga dapat dikenakan bagi pembelajaran tentang kolonialisme.



Dengan berpijak pada eksistensi rakyat, maka pembahasan atas berbagai bentuk kekuasaan beserta perilaku masing-masing secara tidak langsung akan membantu pemahaman substansi demokrasi yang lebih lengkap. Di sini siswa akan dihadapkan pada gambaran atas situasi-situasi yang tercipta ketika rakyat tidak atau belum menjadi subyek dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Ringkasnya, sebelum sampai pada materi pembelajaran tentang demokrasi siswa telah memiliki referensi yang memadai mengenai hal-hal yang bertentangan dengan sendi-sendi demokrasi itu sendiri.

Perlu digarisbawahi bahwa paradigma atau pendekatan memiliki kekuatan untuk mengorganisir materi ke dalam arah tertentu.<sup>5</sup> Ketika demokrasi mendesak untuk mendapatkan prioritas, sementara alokasi waktu pembelajarannya amat terbatas, maka kiranya fungsional bila materi-materi yang berkaitan dengan sistem dan praktik kekuasaan dipahami dari sudut pandang itu. Penting tidaknya suatu materi tergantung pada pendekatan yang dipakai dan dengan sendirinya seleksi materi juga berdasar kepadanya.

Persoalannya kemudian adalah bahwa langkah ini mensyaratkan aktivitas guru secara penuh. Mengorganisir materi ke dalam arah tertentu atau berdasarkan pendekatan tertentu lebih tepat bila dikerjakan oleh guru daripada siswa secara mandiri. Hal ini dapat dimengerti mengingat di dalamnya dibutuhkan abstraksi-abstraksi analitis sesuai dengan titik pijaknya. Modifikasi antara metode ceramah dan tanya jawab terarah kiranya lebih efektif daripada diskusi, terlebih apabila materi pembelajaran tentang demokrasi sendiri belum dipelajari.

Sesungguhnya terdapat suatu keuntungan (selain kerugian) diintegrasikannya sejarah dengan kewarganegaraan. Dalam kewarganegaraan juga terdapat materi tentang demokrasi, terutama dimensi teoritik dan idealnya. Jika aspek-aspek teoritik sudah dipelajari pada bagian kewarganegaraan, maka pembelajaran atas sejumlah materi sejarah berdasarkan pendekatan demokrasi dapat dilakukan dengan metode diskusi. Dalam hal ini tugas guru antara lain menyediakan persoalan-persoalan paradigmatis yang harus diperbincangkan oleh siswa.



Ketika siswa telah memiliki pengetahuan teoritik tentang demokrasi dari bidang ajar kewarganegaraan, guru bisa saja (misalnya) mengarahkan siswa untuk mendiskusikan perihal ketiadaan kedaulatan rakyat dalam tata pemerintahan kolonial. Manifestasi dari ketiadaan seperti itu amat banyak sehingga siswa perlu dirangsang untuk mengeksplorasi bukti-bukti historisnya lebih lanjut secara bersama-sama. Apabila langkah ini berhasil ditempuh, siswa akan memperoleh pengetahuan yang lebih kongkret.

Sudah barang tentu kedalaman eksplorasi sangat tergantung pada tingkat pengetahuan teoritiknya. Semakin luas pengetahuan teoritik siswa, semakin besar pula peluang mereka untuk memperoleh bukti-bukti sejarah yang dimaksud. Karena tingkat pengetahuan teoritik siswa berbeda-beda, maka metode diskusi relevan untuk diterapkan, sehingga satu sama lain saling melengkapi. Dari sini hasil yang diperoleh lebih optimum daripada kerja individual.

Bisa saja ketika siswa sedang mendiskusikan ketiadaan kedaulatan rakyat dalam tata pemerintahan kolonial yang muncul terlebih dulu bukan jawaban-jawaban tetapi justru pertanyaan-pertanyaan kritis. Misalnya, selama kolonialisme bercokol di Indonesia pernahkah dilangsungkan pemilihan umum (pemilu)? Siswa lain barangkali akan mempertanyakan lebih lanjut keberadaan *volksraad*: bagaimana lembaga ini ada, siapa saja yang menjadi anggota, apa fungsinya, dan sejauh mana kewenangannya dalam penyelenggaraan negara? Dua pertanyaan itu memberikan suatu indikasi bahwa siswa memahami kedaulatan rakyat berdasar pada penyelenggaraan pemilu dan eksistensi dewan rakyat.

Diskusi menjadi sangat produktif manakala, misalnya, siswa berpendapat bahwa dijadikannya rakyat pribumi sebagai "sapi perah" bagi kemakmuran negeri induk, diterapkannya diskriminasi rasial yang menempatkan rakyat bumiputera sebagai warga negara kelas tiga, serta dipraktikkannya politik represi untuk mengatasi berbagai bentuk gerakan perlawanan merupakan bukti kongkrit tidak adanya demokrasi.<sup>6</sup> Tentu tidak boleh diremehkan ketika siswa mampu memahami ciri-ciri itu sebagai yang bertentangan dengan asas-asas kemerdekaan, kesamaan, dan persaudaraan.



## C. Pembelajaran di Luar Kelas

### 1. Keharusan Siswa dan Peran Guru.

Spektrum luas materi demokrasi di satu sisi dan sempitnya alokasi waktu pada sisi lain menyebabkan suatu hasil yang tidak optimal bila pembelajarannya terbatas pada jam-jam pertemuan formal. Pembelajaran mandiri di luar kelas, baik secara individual maupun kelompok, perlu digiatkan. Metode ini diharapkan tidak dipahami sebatas sebagai suplemen (pelengkap), tetapi suatu langkah yang mesti ditempuh dalam proses pengayakan. Daripadanya keaktifan dan jiwa eksplorasi siswa dalam belajar dapat dibiasakan secara nyata.

Pembelajaran mandiri di luar kelas tidak berarti bahwa keterlibatan guru tidak diperlukan lagi. Bagaimanapun, pengayaan atau pendalaman materi butuh pedoman, arahan, dan pembimbingan. Pembelajaran mandiri kiranya akan lebih efektif dan berdaya guna apabila tersedia topik dan persoalan-persoalan ilmiah yang jelas rumusannya sehingga siswa memiliki pegangan atas apa yang harus dipelajari.<sup>7</sup> Inilah bekal yang harus diberikan oleh guru kepada siswa ketika kegiatan belajar di luar kelas hendak dilaksanakan.

Selain menyediakan topik dan permasalahan, tugas guru lainnya adalah membantu siswa dalam menemukan sumber-sumber belajar. Tersedia topik dan permasalahan tetapi kalau tidak jelas sumber belajarnya hanya akan menimbulkan kebingungan pada diri siswa. Dalam hal ini fungsi guru sesungguhnya sebatas menunjukkan dan siswa mencarinya secara mandiri. Sebagai contoh, bila sumber belajar itu berupa buku, guru perlu menyebutkan buku apa saja; bila berupa surat kabar, surat kabar apa dan kapan terbitnya. Tentu akan lebih baik lagi jika guru juga membantu menunjukkan dimana sumber-sumber itu bisa diperoleh.

Apabila sumber belajarnya berupa pelaku sejarah yang harus diwawancarai oleh siswa, maka seyogyanya guru juga membekali siswa tersebut dengan daftar pertanyaan. Wawancara akan lebih efektif jika pertanyaan-pertanyaan yang akan



diajukan telah dirumuskan terlebih dulu. Persoalannya adalah bahwa merumuskan pertanyaan yang baik dan relevan dengan topik ataupun permasalahan yang hendak dibahas bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk itu peran/keterlibatan guru dalam penyusunannya tetap perlu.<sup>8</sup>

## **2. Sumber Belajar dan Kegiatan.**

Dalam rangka pembelajaran mengenai kehidupan berdemokrasi, banyak hal dapat dikerjakan oleh siswa di luar kelas. Membahas topik dan permasalahan tertentu dengan cara membaca sejumlah buku penting untuk dibiasakan. Sebagaimana diketahui, buku-buku yang mengkaji praktik kehidupan berdemokrasi, terutama dalam kasus Indonesia, cukup mudah ditemukan. Puluhan buku tentang orde baru dan perkembangan mutakhir era reformasi tentu merupakan sumber belajar yang sangat berharga.

Belajar dari buku tidak harus menghasilkan makalah seperti yang lazim dituntut dari para mahasiswa. Bagi siswa SMTA, kiranya sudah cukup bernilai (terutama pada tahap-tahap awal) ketika mereka berhasil menyusun uraian sesuai topik dan permasalahannya sepanjang satu halaman buku tulis. Meskipun hanya satu halaman atau bahkan mungkin kurang, yang terpenting adalah bahwa tulisan itu dihasilkan dari suatu proses pembacaan (pendalaman) yang serius. Bila hal ini dibiasakan, lama kelamaan kepekaan siswa dalam memahami teks juga akan berkembang.

Selain buku, surat kabar merupakan sumber belajar yang sangat berharga untuk memperkaya pengetahuan tentang praktik kehidupan berdemokrasi. Seperti yang biasa tersaji, surat kabar tidak pernah sepi dari berita-berita, isu-isu, ataupun opini-opini tentang politik kekuasaan. Sejauh mana demokrasi (dalam berbagai dimensinya) dipraktikkan (bukan sekedar dicita-citakan) oleh bangsa Indonesia sungguh dapat dipelajari dari isi surat kabar. Dapat dikatakan bahwa bagi pers, cetak ataupun elektronik, tiada hari tanpa berita politik.



Meskipun sederhana, membuat klipng koran berdasarkan topik tertentu merupakan bentuk pembelajaran di luar kelas yang seyogyanya digairahkan. Bisa saja tugas seperti itu bersifat individual, tetapi akan lebih baik jika bersifat kelompok (kecil), terutama dalam rangka terciptanya proses saling melengkapi (saling belajar). Karena tersedia cukup banyak topik, maka sebaiknya antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya membuat klipng dengan topik yang berbeda. Topik-topik itu antara lain (misalnya): kampanye pemilu, pemilu, Sidang Istimewa MPR, ketidakharmonisan hubungan antara DPR dan Presiden, perpecahan partai politik, merebaknya KKN dan politik uang, penegakan hukum dan HAM, dan lain sebagainya.

Walaupun hanya membuat klipng, karena hal itu harus berdasar pada topik tertentu, maka proses pengerjaannya menuntut siswa untuk membacanya terlebih dulu. Agar siswa tidak hanya membaca judulnya, tetapi juga isinya, kiranya perlu bila dalam tugas itu siswa diarahkan untuk menemukan duduk perkara dari setiap ketidakberesan ataupun akibat-akibat yang ditimbulkannya. Selain hal-hal yang bersifat kegagalan atau penyimpangan, tentu saja juga amat penting bagi siswa untuk mempelajari aspek-aspek keberhasilannya, sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemahaman yang berat sebelah.

Sumber belajar yang juga sangat berharga bagi pemahaman lebih lanjut mengenai praktik kehidupan berdemokrasi adalah masyarakat lingkungan sekitar sekolah. Fungsi mereka sebagai sumber belajar terutama untuk kasus-kasus lokal, karena problem-problem demokrasi (seperti problem-problem lain) sesungguhnya tidak hanya muncul di tingkat nasional.<sup>9</sup> Pada tingkat desa sekalipun problem-problem demokrasi juga ada. Artinya, belajar bersama masyarakat sekitar memiliki fungsi strategis bagi proses perluasan skala jangkauan, sekaligus penajaman dan kongkretisasi, pemahaman atas praksis demokrasi.

Munculnya Badan Perwakilan Desa (BPD) pada era reformasi, misalnya, kiranya menarik apabila dijadikan salah satu fokus. Siswa dapat didorong untuk menelusuri perbedaan-perbedaan mendasar mengenai sistem pemerintahan desa



sebelum dan semenjak munculnya BPD, fungsi reformatif BPD dalam proses demokratisasi, penyalahgunaan kedudukan dan kewenangan anggota BPD, isu-isu yang berkembang di masyarakat tentang BPD ataupun Kepala Desa semenjak munculnya BPD, dan lain-lain. Nah, di sini siswa akan dihadapkan pada nara sumber yang cukup banyak: perangkat desa, anggota BPD, pemuka masyarakat, ataupun orang-orang awam.

Nara sumber yang cukup banyak juga dapat digunakan oleh siswa ketika mereka hendak mengetahui duduk perkara politik uang, mekanisme operasionalnya, dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Bukan rahasia lagi bahwa dalam banyak kasus, politik uang mewarnai pemilihan kepala desa, dan semenjak kemunculan BPD, juga mewarnai pemilihan kepala dusun dan pengangkatan sekretaris desa. Kiranya penting bila siswa juga mengetahui bagaimana rakyat pemilih memahami praktik-praktik seperti itu.<sup>10</sup>

Pada lingkup Rukun Tetangga (RT) sekalipun, siswa juga dapat mempelajari bagaimana atau sejauh mana nilai-nilai demokrasi diimplementasikan. Tidak perlu diragukan bahwa pada lingkup ini umumnya pengambilan keputusan publik dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh warga. Musyawarah-mufakat lebih diutamakan daripada voting. Meski demikian, siswa dapat mengeksplorasi lebih lanjut perihal (misalnya) siapa atau kelompok sosial mana yang cenderung dominan dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini penting mengingat warga RT, di pedesaan sekalipun, tidaklah monolitik, tetapi terdiri dari sejumlah kelompok sosial. Siswa juga berkesempatan untuk mempelajari apakah setiap keputusan, meski diperoleh melalui musyawarah-mufakat, bersifat adil (tidak ada warga yang dirugikan). Seandainya terdapat keputusan yang tidak adil, bagaimana "para korban" menyikapinya?

Bahwa suatu keputusan bersama tidak dengan sendirinya adil dapat disimak dari contoh kasus berikut. Pada masa krisis sejumlah keluarga miskin memperoleh kesempatan untuk membeli beras dengan harga murah sebanyak 20 kilogram/bulan.

Karena ketika “tidak semua keluarga mendapatkannya” dipahami sebagai tidak adil oleh sekelompok warga, sejumlah RT kemudian membuat keputusan untuk membaginya secara merata, termasuk kepada keluarga-keluarga mampu. Akibatnya, yang berhak (dan riil memang amat membutuhkan) atas 20 kilogram beras itu hanya mendapatkan kurang dari separonya. Adilkah?

Dari masyarakat lingkungan sekitar siswa juga dapat, misalnya, mempelajari perbedaan suasana pemilu pada zaman orde baru dengan pemilu 1999. Para orang tua siswa atau siapapun yang telah berulang kali mengikuti pemilu tentu memiliki ingatan-ingatan tertentu mengenainya. Aspek-aspek apa yang berbeda secara tajam dan aspek-aspek apa yang tetap sama dapat dieksplorasi dengan leluasa. Artinya, lingkungan sekitar sekolah menyediakan sumber belajar yang memadai, sekaligus amat berharga, bagi usaha untuk memahami secara komparatif multi segi pemilu dari dua zaman.

Ketika orang tua, nenek-kakek, handai taulan, dan tetangga dapat bercerita tentang banyak hal, mengapa siswa tidak didorong untuk menggalinya? Bukankah mereka juga pelaku-pelaku sejarah ataupun pemaham atas realitas-realitas masa lalu? Mengapa kita, para guru, harus ragu akan manfaat dari metode seperti itu dan cenderung mengurung diri dalam ceramah-ceramah kelas atas pengetahuan kita yang sesungguhnya amat terbatas? Apakah metode “belajar bersama masyarakat” tidak praktis? Jawabnya jelas dan tegas: praktis (bahkan sekaligus strategis).

Janganlah dibayangkan bahwa belajar dengan bersumber pada masyarakat merupakan sesuatu yang rumit. Metode ini amat sederhana dan seharusnya tetap dirancang secara sederhana. Ada persoalan, kemudian ditanyakan: nara sumber bercerita, siswa mendengarkan. Pasca eksplorasi siswa membuat rangkuman tertulis atas hal-hal yang dianggap penting.

Kapan metode belajar seperti itu dapat diterapkan? Setiap saat! Tidakkah kegiatan seperti itu butuh waktu? Jelas, tetapi tidak menyita waktu! Bukankah investigasi atas hal-hal yang



diketahui orang tua dapat dilakukan sambil makan siang atau nonton TV? Yang hendak ditanyakan kepada tetanggapun dapat di-kerjakan di sela-sela kesibukan yang lain, semisal saat ronda atau kerja bhakti. Lebih lanjut, dengan penggiatan metode belajar tadi pemborosan waktu (untuk hal-hal yang tidak berguna) dapat ditekan.

#### **D. Penutup**

Pembelajaran sejarah tentang praksis demokrasi perlu mendapatkan perhatian serius mengingat penegakan demokrasi senantiasa merupakan salah satu agenda besar bangsa Indonesia. Selain itu, siswa (pelaku pembelajaran) pada dasarnya merupakan generasi muda rakyat pemilik kedaulatan itu sendiri, sehingga mereka harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenainya.

Spektrum luas materi demokrasi mensyaratkan langkah-langkah pembelajaran yang lebih beragam. Pertama, menjadikan demokrasi sebagai paradigma dalam pembelajaran materi lain; dan kedua, penggiatan pembelajaran di luar kelas. Siswa harus semakin didekatkan dengan berbagai sumber belajar, baik yang berupa buku-buku bacaan, pers cetak dan elektronik, ataupun masyarakat lingkungan sekitar sekolah.

Kepercayaan akan ketidakrumitan, efektivitas, dan nilai strategis metode pembelajaran di luar kelas tersebut harus tumbuh terlebih dulu pada diri guru. Pandangan bahwa guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan harus benar-benar dipahami kepada siswa dan diwujudkan dalam langkah-langkah pembelajaran. Catatan akhir (dan tidak kalah penting): ini semua tidak berarti bahwa tugas guru lebih ringan. Saya kira guru dihormati bukan hanya karena pengetahuannya, tetapi juga kesanggupannya untuk memikul tugas yang tidak ringan (tidak serta merta berarti berat).

#### **Daftar Pustaka**

Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

- Gilbert J. Garraghan, S.J., Gilbert J., *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press, 1957.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
- Norling, Bernard, *Towards a Better Understanding of History*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1960.
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Suseno, Franz Magnis, *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

### Catatan Akhir :

- <sup>1</sup> Pelajari lebih lanjut Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) dan Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- <sup>2</sup> Franz Magnis Suseno, *Mencari Makna Kebangsaan*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 64.
- <sup>3</sup> Bernard Norling, *Towards a Better Understanding of History*. (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1960), hlm. 8.
- <sup>4</sup> Kurikulum 2001 berusaha mengurangi jumlah total jam pelajaran dalam setiap minggunya dengan alasan agar beban belajar siswa tidak terlalu banyak. Sejarah menjadi "korban" dari perampingan itu.
- <sup>5</sup> Ini sebenarnya dimodifikasi dari pentingnya pendekatan dalam penulisan sejarah. Terbukti bahwa penulisan sejarah menjadi lebih ilmiah dan produktif ketika pendekatan mulai diperkenalkan. Kiranya hal ini juga dapat dipakai dalam proses pembelajaran sejarah. Perihal fungsi pendekatan lihat Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).



- <sup>6</sup> Ciri-ciri kolonialisme seperti itu tentu akan mudah didapat dalam banyak buku. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- <sup>7</sup> Pembelajaran adalah suatu kegiatan ilmiah. Seperti halnya ketika seseorang hendak membuat makalah, skripsi, tesis, atau tulisan ilmiah lain, ia mensyaratkan adanya rumusan topik dan permasalahan. Lihat Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 41-46.
- <sup>8</sup> Tentang perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam interview lihat Gilbert J. Garraghan, S.J., *A Guide to Historical Method*. (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 130.
- <sup>9</sup> Dalam disiplin sejarah, selain sejarah nasional juga dikenal adanya sejarah lokal. Meskipun lingkup spasialnya berbeda, keduanya memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Lihat Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985).
- <sup>10</sup> Pada suatu saat, dalam perbincangan perihal tatanan baru, seorang warga desa mengemukakan bahwa siapapun yang menjadi kepala desa atau kepala dusun tidaklah soal, karena kelak sama saja perilakunya. Untuk itu, kata dia, siapapun yang membayar paling banyak yang pantas untuk dipilih. Perbincangan lain yang berkembang saat itu adalah seputar semakin tidak luasnya seorang kepala desa untuk main kuasa seperti masa lalu dan munculnya penguasa-penguasa baru (maksudnya anggota BPD). Ungkapan-ungkapan bahwa para anggota BPD sedang panen cenderung akan muncul pada saat pemilihan kepala dusun berlangsung secara beruntun atau ketika ada pergantian sekretaris desa. Terlepas soal benar dan tidaknya, ungkapan-ungkapan seperti itu riil terjadi, suatu ungkapan yang mencerminkan pandangan tentang kekuasaan.